

Nama: Mochammad Juhairi

Nim: 125030207111069

No. Absen: 22

Matkul: Hubungan Industrial (Tugas Pendekatan Sistem Politik dan Ekonomi dalam Hubungan Kerja)

Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi liberal-kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atas sumber daya ekonomi atau faktor produksi. Pada sistem ekonomi ini terdapat keleluasaan bagi perseorangan untuk memiliki sumber daya, seperti kompetensi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antar badan usaha dalam mencari keuntungan.

Prinsip "*Keadilan*" yang dianut oleh sistem kapitalis adalah "*setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya*". Dalam hal ini campur tangan pemerintah sangat minim, sebab pemerintah berkedudukan sebagai "*pengamat*" dan "*pelindung*" dalam perekonomian.

Secara garis besar, ciri-ciri sistem ekonom liberal-kapitalistik dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Adanya pengakuan yang luas terhadap hak-hak pribadi
2. Praktek perekonomian diatur menurut mekanisme pasar
3. Praktek perekonomian digerakkan oleh motif keuntungan (*profit motive*)

1. Kapitalisme Awal (*Early Capitalism*)

Kapitalisme awal adalah Kapitalisme pada abad ke-17 sampai sekitar awal abad ke-20. Kapitalisme awal berkembang subur dinegara-negara Anglo Saxon. Nilai-nilai yang paling dominan dalam Kapitalisme awal adalah individualisme (*individualism*), kemajuan material (*material progress*) dan rasionalitas (*rationality*). Nilai-nilai ini amat terlihat dalam ajaran Adam Smith, tersedianya apa yang kita butuhkan bukanlah karena kebaikan orang lain yang memerhatikan nasib sesamanya, tetapi justru karena ambisi dan keserakahan pribadi. Orang memproduksi baju bukan karena kasihan kepada orang lain yang kedinginan, tetapi karena dengan menjual bajunya dia memperoleh keuntungan.

2. Kapitalisme Modern (*Advanced Capitalism*)

Kapitalisme modern (*advance capitalism*) adalah sistem ekonomi kapitalis yang disempurnakan. Beberapa unsur penyempurnaan yang paling mencolok adalah diterimanya peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian. Pentingnya peranan pemerintah terutama sebagai wasit mengawasi jalannya bisnis. Selain itu, kebebasan individu juga dibatasi melalui pemberlakuan berbagai peraturan, khususnya Undang-Undang Anti Monopoli (*Antitrust Law*). Yang terpenting juga, semakin diperhatikannya nasib pekerja, dengan diberlakukannya peraturan-peraturan yang melindungi hak asasi buruh sebagai manusia. Serikat buruh juga diizinkan berdiri dan memperjuangkan nasib para pekerja. Penyempurnaan kapitalisme juga menyentuh masalah hak kepemilikan.

3. Institusi-Institusi Dalam Ekonomi Kapitalis

Lima institusi pokok yang membangun sistem ekonomi kapitalis adalah hak kepemilikan, keuntungan, konsumerisme, kompetisi, dan harga.

4. Kekuatan dan Keterbatasan Perekonomian Kapitalis

Umumnya perekonomian kapitalis menggunakan mekanisme pasar sebagai alat koordinasi. Akibatnya, kekuatan dan keterbatasan mekanisme pasar sekaligus juga merupakan kelemahan sistem kapitalis. Dilihat dari sisi historis harus diakui, mekanisme pasar yang sangat mengandalkan kebebasan individu, rasionalitas dan semangat mencari keuntungan telah berhasil meningkatkan motivasi kerja, inovasi, dan produktivitas. Bukankah data-data menunjukkan bahwa sebagian besar dari negara-negara kapitalis? Sebut saja, perusahaan mobil Ford, Bertz, Honda. Atau pengusaha-pengusaha yang bergerak dalam bisnis komunikasi atau informasi modern seperti Bill Gates dan Murdock. Tetapi, karena pasar dalam dunia yang digambarkan kaum kapitalis, maka pasar tidak sepenuhnya memenuhi harapan mereka.

Sistem Ekonomi Sosialis

Jika sistem kapitalis sangat percaya bahwa kemakmuran bersama harus dibangun diatas fondasi kemakmuran individu, sistem sosialisasi berpandangan sebaliknya. Kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila berfondasikan kemakmuran bersama. Konsekuensinya, penguasa individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor ekonomi harus ditekan sesedikit mungkin. Itulah sebabnya, dalam masyarakat sosialis sebagian besar kepemilikan merupakan kepemilikan sosial (social property).

1. Sosialisme-Marxisme

Ajaran marxisme merupakan ajaran tentang evolusi perkembangan sistem masyarakat (ekonomi), dari tahap terendah hingga tahap tertinggi. Menurut Karl Mar, perkembangan masyarakat (sosial) ekonomi dibagi menjadi 6 tahap:

- a. Tahap komunisme awal (tribal comunism).
- b. Tahap perbudakan (slavery).
- c. Tahap feodal (feodalism).
- d. Tahap kapitalis (capitalism).
- e. Yahap sosialisme (socialism).
- f. Tahap komunisme (comunism).

2. Sosialisme-Komunisme

Dalam analisis Marx, istilah komunis mengacu pada kondisi masyarakat ideal, yang kelak akan dicapai oleh manusia, setelah melalui tahap-tahap evolusi sosial-ekonomi. Namun dalam pandangan para pemimpin Marxisme Rusia diawal abad ke-20, teutama Lenin dan penggantinya (stalin), jika menunggu seperti tahap evolusi Karl Marx mengenai masyarakat komunis ideal, masih terlalu lama terwujud. Mereka tidak sabar lagi menunggu. Karena itu mereka memprecepat proses evolusi sosial

tersebut dengan melakukan tindakan-tindakan kongkret. Tindakan pertama adalah merebut kekuasaan dari tangan kaum borjuis. Dalam hal ini adalah kaisar Rusia saat itu, Tsar Nicholas II. Mereka melakukannya lewat Revolusi Sosial 1917, yang berhasil, meruntuhkan kekuasaan negara.

Langkah selanjutnya adalah mempercepat proses terbentuknya masyarakat komunis yang diimpikan. Menurut Lenin, percepatan itu hanya mungkin jika:

- a. Mereka memegang kekuasaan mutlak (diktator).
- b. Mereka harus menghancurkan pusat-pusat kekuatan kapitalis, yaitu Eropa Barat dan Amerika Serikat.
- c. Agar dapat terbentuk militer yang kuat, maka industri juga harus kuat.
- d. Untuk memperbesar basis kekuatan, mereka harus menyebarkan ajaran komunis keseluruhan dunia, sekaligus mengubah negara-negara didunia ini menjadi negara komunis.

SISTEM EKONOMI PANCASILA

Ekonomi Pancasila adalah pandangan filsafat dibidang kehidupan ekonomi sebagai implikasi langsung dari diterimanya Pancasila di negeri ini, jika Pancasila adalah khas Indonesia, maka Ekonomi Pancasila adalah ekonomi khas Indonesia.

Secara normatif, landasan dari Ekonomi Pancasila adalah apa yang terkandung di dalam pembukaan, pasal-pasal 23, 27 ayat (2), 33, dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Dari pembukaan dan pasal-pasal inilah orientasi Ekonomi Pancasila akan dikemukakan dalam makalah ini, dan dari itu semua akan disentuh sumber-sumber ideal yang memunculkan pedoman-pedoman dan aturan-aturan mengenai hal tersebut.

Dasar Filosofi

Dalam buku Abdul Majdid yang berjudul “wawasan Ekonomi Pancasila” di katakan bahwa konsep Ekonomi Pancasila tidak terlepas dari peranan agama (Islam, Kristen, Hindu, Darma). Dari hal tersebut, unsur moral yang diajarkan dalam agama dapat menjadi salah satu factor pendorong utama pemikiran dan kegiatan ekonomi. Pancasila yang merupakan ideologi Negara Indonesia memberi dasar yang kuat pada konsep ekonomi yang berdasarkan moral, lebih-lebih setelah runtuhnya faham komunisme tahun 1965 dimana terjadi kebangkitan kembali semangat pancasila. Oleh karena itu, ilmu (teori) Ekonomi Pancasila pastilah berbeda dari teori ekonomi klasik, terutama dalam aspek moralnya yang bersumber pada nilai-nilai agama.

Mengenai pola berpikir terhadap ekonomi ini terdapat beberapa perbedaan yang nantinya menjadi kelompok-kelompok pemikir yang setuju terhadap Ekonomi pancasila atau sebaliknya. Pola berpikir para pemikir ekonomi dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu :

1. Mereka yang tetap percaya bahwa ilmu ekonomi barat yaitu ilmu ekonomi kapitalis klasik-neo-klasik adalah universal, bebas dari nilai, bebas dari moral dan bebas dari agama. Jadi sepanjang ilmu ini dianggap mampu membuat negara-negara barat maju, harus pula dapat diterapkan di Indonesia tanpa perubahan apapun.

2. Mereka yang membedakan secara jelas antara ilmu ekonomi positif dan ilmu-ilmu normatif. Kelompok ini jelas berpendapat bahwa banyak sekali teori ekonomi barat yang dapat kita manfaatkan sebagai pedoman dasar kebijakan yang dalam penerapannya akan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan hidup masyarakat Indonesia.

3. Mereka yang benar-benar menyadari keterbatasan teori-teori barat, termasuk mereka yang yakin bahwa diperlukan teori ekonomi baru yang nanti merupakan teori Ekonomi Pancasila.

Tentu saja di luar tiga kelompok tersebut dapat ditemukan variasi kelompok pemikir lain-lain. Tapi yang jelas kita tidak boleh meremehkan perbedaan-perbedaan dari ketiganya. Adalah tugas suci dari para pemikir untuk dengan semangat pancasila mempertemukan pendapat-pendapat tersebut menuju penemuan besar teori dan Sistem Ekonomi Pancasila.

Sosialisme Menjadi Salah Satu Dasar Pemikiran Terhadap Ekonomi

Ekonomi Pancasila banyak terlarat belakangi dari masalah yang datang dari tubuh negeri ini sendiri. Dengan membawa pembahasan masalah ini kepada latar belakang *historis-aspiratif*, maka dapat diharapkan masalah ini membuahkan suatu pandangan yang lebih bulat, meskipun mungkin tidak sepenuhnya dapat menghasilkan suatu konsesus.

Di Indonesia kita semua dapat menerima paham sosialisme religius. Perkataan ini pertama-tama dikemukakan oleh Bung Hatta dan pula oleh Presiden Suharto dalam pidato beliau pada Dies Natalis Universitas Indonesia tahun 1975 .

Menurut Bung Hatta, sosialisme Indonesia timbul dari tiga faktor, yaitu :

1. Sosialisme Indonesia timbul karna suruhan agama. Karna adanya etik agama yang menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong-menolong antar sesama manusia dalam pergaulan hidup, orang terdorong ke sosialisme. Jadi, sosialisme Indonesia muncul dari nilai-nilai agama.

2. Sosialisme Indonesia merupakan ekspresi dari pada jiwa berontak bangsa Indonesia yang memperoleh perlakuan yang sangat tidak adil dari penjajah. Sosialisme Indonesia lahir dalam pergerakan menuju kebebasan dari penghinaan dan dari penjajahan, yang dengan sendirinya terpicat pula oleh tuntutan sosial dan humanisme yang disebarkan oleh pergerakan sosialisme di barat. Hal ini dengan kuatnya muncul sebagai tekad bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya : “ bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karna tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat-sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

3. Para pemimpin Indonesia yang tidak dapat menerima marxisme sebagai pandangan yang berdasarkan materialisme, mencari sumber-sumber sosialisme dalam masyarakat sendiri. Bagi mereka, sosialisme adalah suatu tuntutan jiwa, kemauan hendak mendirikan suatu masyarakat yang adil dan makmur, bebas dari segala tindasan. Sosialisme dipahamkan sebagai tuntutan institusional, yang bersumber dalam lubuk hati yang murni, berdasarkan perikemanusiaan dan keadilan sosial. Dasar-dasar bagi sosialisme Indineaia terdapat pada masyarakat desa yang kecil, yang bercorak kolektif, yang banyak sedikitnya masih bertahan sampai sekarang.

Pandangan yang dikemukakan oleh Bung Hatta merupakan bahan untuk interpretasi mengenai ekonomi Indonesia. Dari pandangan itulah muncul hakekat Kesejahteraan Sosial yang memuat dua

pasal, yaitu pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Adanya tanggung jawab negara terhadap rakyatnya, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia serta penggunaannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, melahirkan hak-hak warganegara yang menyangkut kesamaan kedudukan dan kelayakan penghidupan sebagai manusia, mempertegas adanya orientasi sosialis. Ketentuan mengenai beban pajak, nilai kekayaan, anggaran belanja Negara lebih memperkuat orientasi ini.

Pemikiran tersebut dengan jelas memaparkan bahwa Negara sebagai tampuk pemegang kekuasaan harus memakmurkan rakyatnya. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan membuka lapangan pekerjaan yang tak hanya dibangun di daerah perkotaan saja, akan tetapi masyarakat terpencil pun harus diperhatikan juga agar ideologi Pancasila yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya terlaksana dengan baik.